

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2024



DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Revisi Sesuai Arsitektur Kinerja
Tahun 2024



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR

Jalan Prof. Dr. Moh. Yamin No. 33 Palu 941114 Telp. (0451) 4015509

Website : www.cikasda.sultengprov.go.id Email : cikasda@sultengprov.go.id

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Definisi/Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Layanan Infrastruktur SDA untuk Ketahanan Bencana	Persentase Layanan Infrastruktur SDA untuk Ketahanan Bencana	44.69	<p>- Pengelolaan Sumber Daya Air Adalah Upaya Merencanakan, Melaksanakan, Memantau, dan Mengevaluasi Penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air.</p> <p>- Wilayah Sungai adalah Kesatuan Wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Satu Atau Lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau Pulau-Pulau Kecil Yang Luasnya Kurang dari atau sama dengan 2.000 Km2.</p> <p>- Pengamanan Pantai adalah Upaya Untuk Melindungi dan Mengamankan Daerah Pantai Dan Muara Sungai dari Kerusakan Akibat Erosi, Abrasi, Dan Akresi.</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> <p>- Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendali Banjir Di WS. Kewenangan Provinsi / Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Di WS. Kewenangan Provinsi</p>	<p>- Data Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Di WS Kewenangan Provinsi (ha)</p> <p>- Data Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir Di WS Kewenangan Provinsi (ha)</p> <p>- Data Daerah Rawan Banjir</p>	<p>- Kepala Bidang Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku</p> <p>- Kepala UPT PSDA Wil. I dan II</p>
2	Meningkatnya Kapasitas Air Baku	Kapasitas Air Baku	6.32	<p>Secara geografis masih terdapat daerah yang sangat kritis terhadap akses air baku disebabkan potensi air baku berupa air permukaan maupun air tanah tidak tersedia. Kondisi ini dibutuhkan pembangunan infrastruktur air baku untuk memberikan pelayanan sesuai kebutuhan, baik untuk keperluan rumah tangga sehari-hari maupun untuk kebutuhan usaha pertanian, peternakan dan lain-lain.</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> <p>- Kapasitas Air Baku yang terlayani melalui Penyaluran Air Baku di Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi</p>	<p>- Data Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas Yang memerlukan pelayanan Air Baku Di WS Provinsi (ha)</p> <p>- Data Jumlah kumulatif kapasitas Yang dapat terlayani melalui penyaluran Air Baku Di WS Kewenangan Provinsi.</p>	<p>- Kepala Bidang Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku</p> <p>- Kepala UPT PSDA Wil. I dan II</p>
3	Meningkatnya Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	56.43	<p>- Jaringan Irigasi adalah Saluran, Bangunan, dan Bangunan Pelengkap yang Merupakan Satu Kesatuan yang diperlukan untuk Penyediaan, Pembagian, Pemberian, Penggunaan, dan Pembuangan Air Irigasi.</p> <p>- Pengelolaan Aset Irigasi adalah Proses Manajemen yang Terstruktur untuk Perencanaan Pemeliharaan dan Pendanaan Sistem Irigasi guna Mencapai Tingkat Pelayanan yang ditetapkan dan Berkelanjutan bagi Pemakai Air Irigasi dan Pengguna Jaringan Irigasi dengan Pembiayaan Pengelolaan Aset Irigasi seefisien mungkin.</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> <p>IKSI merupakan suatu indeks atau nilai, hasil penelusuran jaringan dan evaluasi kinerja sistem irigasi, menggunakan variabel dan indikator yang diatur dalam Permen PU No. 23/2015 dan Petunjuk Pelaksanaan ePaksi</p>	<p>- Data Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi (ha)</p> <p>- Data Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang ditingkatkan (ha)</p> <p>- Data Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang direhabilitasi (ha)</p> <p>- Data Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dioperasi (ha)</p> <p>- Data Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dipelihara (ha)</p> <p>- Data Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dibangun (ha)</p>	<p>- Kepala Bidang Irigasi dan Rawa</p> <p>- Kepala UPT PSDA Wil. I dan II</p>
4	Meningkatnya Akses Sanitasi Yang Layak Bagi Masyarakat	Kinerja Pelayanan SPALD-S Akses Layak	76.30	<p>- Air Limbah Domestik Adalah Air Limbah Yang Berasal Dari Usaha Dan/Atau Kegiatan Permukiman, Rumah Makan, Perkantoran, Perniagaan, Apartemen Dan Asrama.</p> <p>- Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD Adalah Serangkaian Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Dalam Satu Kesatuan Dengan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik</p> <p>- Penyelenggaraan SPALD Adalah Serangkaian Kegiatan Dalam Melaksanakan Pengembangan Dan Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Untuk Pelayanan Air Limbah Domestik</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> <p>Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi / Jumlah Rumah Tinggal</p>	<p>- Data Jumlah rumah Tinggal Berakses Sanitasi</p> <p>- Data Jumlah rumah Tinggal Di KSP</p>	<p>- Kepala Bidang Air Minum Dan Kesehatan Lingkungan</p>
5	Meningkatnya Rumah Tangga Dengan Akses Sampah Yang Terkelola Diwilayah Kewenangan Provinsi	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sampah Yang Terkelola Diwilayah Kewenangan Provinsi	30.77	<p>- Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penangan Sampah adalah Kegiatan Merencanakan, Membangun, Mengoperasikan dan Memelihara, Serta Memantau dan Mengevaluasi Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</p> <p>- Prasarana Persampahan adalah Fasilitas Dasar Yang dapat Menunjang Terlaksananya Kegiatan Penanganan Sampah</p> <p>- Sarana Persampahan adalah Peralatan Yang dapat Dipergunakan dalam Kegiatan Penanganan Sampah</p> <p>- Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari Kegiatan Sehari hari dalam Rumah Tangga, yang tidak termasuk Tinja dan Sampah Spesifik</p> <p>- Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum, dan/atau Fasilitas lainnya</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> <p>Jumlah Rumah Tangga yang terlayani oleh (TPA/TPS/SPA) / Jumlah Rumah Tangga di Wilayah KSP</p>	<p>- Data Jumlah Kabupaten/Kota Yang akan dilaksanakan Pemahaman Pengelolaan Sampah</p> <p>- Data Jumlah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bersangkutan</p>	<p>- Kepala Bidang Air Minum Dan Kesehatan Lingkungan</p>

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Definisi/Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
6	Meningkatnya Layanan Akses Air Minum Untuk Masyarakat	Persentase Penduduk Dengan Akses Air Minum Layak	52.32	Air Minum Layak adalah Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak yaitu Air Ledeng, Air hujan dan Sumur bor dan Air Terlindungi Rumus Perhitungan : Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum / Jumlah Rumah Tangga	- Data Penduduk Berakses Air Minum - Data Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota	- Kepala Bidang Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan - Kepala UPT SPAM
7	Meningkatnya Kualitas Drainase Kewenangan Provinsi	Persentase Panjang Drainase Kondisi Baik	64.60	- Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan Adalah Upaya Merencanakan, Melaksanakan Konstruksi, Mengoperasikan, Memelihara, Memantau, Dan Mengevaluasi Sistem Fisik Dan Non Fisik Drainase Perkotaan. - Sistem Drainase Perkotaan Adalah Satu Kesatuan Sistem Teknis Dan Non Teknis Dari Prasarana Dan Sarana Drainase Perkotaan - Prasarana Drainase adalah Lengkungan Atau Saluran Air Dipermukaan Atau Dibawah Tanah, Baik Yang Terbentuk Secara Alami Maupun Dibuat Oleh Manusia, Yang Berfungsi Menyalurkan Kelebihan Air Dari Suatu Kawasan Ke Badan Air Penerima - Sarana Drainase Adalah Bangunan Pelengkap Yang Merupakan Bangunan Yang Ikut Mengatur Dan Mengendalikan System Aliran Air Hujan Agar Aman Dan Mudah Melewati Jalan, Belokan Daerah Curam, Bagunan Tersebut Seperti Gorong-Gorong, Pertemuan Saluran, Bangunan Terjunan, Jembatan, Tali-Tali Air, Pompa, Pintu Air. Rumus Perhitungan : Persentase Panjang Drainase Pembuangan Aliran Air Kondisi Baik / panjang total Seluruh Drainase	- Data Panjang Drainase tersumbat pembuangan aliran Air (Km) - Data Panjang seluruh Drainase Di KSP (Km²)	- Kepala Bidang Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan
8	Meningkatnya Kualitas Implementasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Yang Tertib Dan Andal	Persentase kab/kota yang terfasilitasi Implementasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang Tertib dan Andal	57.62	- Mewujudkan Bangunan Gedung Negara Sesuai Fungsinya - Memenuhi Persyaratan Keselamatan, Kesehatan, Kenyamanan, Kemudahan, Efisien Dalam Penggunaan Sumberdaya, Serasi Dan Selaras Dengan Lingkungannya. - Mewujudkan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Yang Tertib Efektif dan Efisien - Keandalan Bangunan Gedung Adalah Meliputi Ketentuan Aspek Keselamatan, Kesehatan, Kenyamanan Dan Kemudahan Bangunan Gedung Rumus Perhitungan : Jumlah Bangunan Gedung di Kawasan Strategis Provinsi yang dilakukan Penataan / Jumlah Bangunan Gedung di kawasan Strateois Provinsi	- Data Jumlah Bangunan Gedung di Kawasan Strategis Provinsi (unit) - Data Jumlah Bangunan Gedung di Kawasan Strategis Provinsi yang dilakukan Penataan (unit)	Kepala Bidang Penataan Lingkungan Dan Bangunan Gedung

Mengetahui,
KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Dr. ANDI RULY DJANGGOLA, SE.,M.Si
NIP. 19801216 200212 1 003